



KABUPATEN BADUNG

**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BADUNG
2023**

DAFTAR ISI

		Hal
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023		
DAFTAR ISI.....		i
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1 Latar Belakang.....	1
	2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1
	3 Tujuan Perjanjian Kinerja.....	2
BAB II	PERJANJIAN KINERJA.....	3
	1 Sasaran Strategis.....	3
	2 Indikator Kinerja Utama	3
	3 Pelaksanaan Program dan Anggaran.....	3
BAB III	PENUTUP.....	4
LAMPIRAN		



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.A. Ngurah Bayu Kumara Putra, ST. MT
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 25 September 2023

BUPATI BADUNG

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung



A.A. Ngurah Bayu Kumara Putra, ST. MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19670425 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja PD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu dokumen yang dipergunakan adalah dokumen Perjanjian Kinerja dari masing-masing PD guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, merupakan suatu dokumen pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Dilaksanakan antara pengemban tugas (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung) dengan atasannya (Bupati Badung) berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi .

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun –tahun sebelumnya . Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah maka Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dinas
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Penyelenggaraan PSU dari:

Kelompok Jabatan Fungsional

Unit Pelaksana Teknis

3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dari program dan kegiatan di Tahun 2023 yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- 1). Terlaksananya Pengembangan Perumahan
- 2). Terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh
- 3). Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni
- 4). Mewujudkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Layak dan Memadai di Kabupaten Badung
- 5). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

2. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai sampai pada akhir Tahun 2023.

3. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pencapaian target pada indikator kinerja tak lepas dari program, kegiatan serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung pada Tahun 2023. Terdapat 5 program dengan total pagu anggaran perubahan sebesar **Rp. 117.137.641.642** yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung seperti pada lampiran dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja dan personil didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya di dalam kegiatan bidang perumahan.



**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung**

A.A Ngurah Bayu Kumara Putra, ST. MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19670425-199803 1 006

LAMPIRAN

Tabel I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Tata Kelola yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.	1. Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6 Kegiatan	15.649.601.000
				Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan:	3 Sub kegiatan	342.844.548
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		336.459.837
				2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.384.711
				Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan:	1 Sub kegiatan	12.783.397.077
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12.783.397.077
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan:	7 Sub kegiatan	1.118.730.516
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.686.406
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		870.477.517
				3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.910.893
				4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		139.117.100
				5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		30.940.076
				6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		49.230.000
				7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		24.368.524

				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan	1 Sub kegiatan	87.586.592
				1 Pengadaan Mebel		87.586.592
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan:	3 Sub kegiatan	389.558.221
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		43.492.453
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dara Air dan Listrik		11.965.000
				3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		334.100.768
				Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :	6Sub kegiatan	927.484.046
				1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		120.613.100
				2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		694.503.800
				3 Pemeliharaan Mebel		11.000.000
				4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		83.828.696
				5 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		11.538.450
				6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6.000.000
Sasaran Kabupaten : Mewujudkan Tataatnan Masyarakat yang tertib, Taat Azas serta menjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)						

1	Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 2. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100,00%	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		3 Kegiatan	6.888.339.484
				Kegiatan: Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sub Kegiatan:		2 Sub kegiatan	501.975.727
				1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		499.721.788
				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		2.253.939
	Terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh	1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100,00%	Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan:		6 Sub kegiatan	953.378.486
				1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		1.071.677
			100,00%	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1.051.674
				3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		1.021.674
4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			8.751.129			
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			864.240.814			
	6	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		95.241.518			


				Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan :	4 Sub Kegiatan	5.432.985.271
				1 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) 2 Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 3 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 4 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		178.499.523 1.205.402 1.103.864 5.252.176.482
	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak Layak Huni	1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100,00%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:	3 Kegiatan 2 Sub kegiatan	456.958.283 439.537.411
				1 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 2 Identifikasi Lahan lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		226.260.896 213.276.515
				Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :	2 Sub Kegiatan	8.352.634
				1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		4.891.991 3.460.643

				Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sub Kegiatan:	2 Sub kegiatan	9.068.238
				1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		7.015.048
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		2.053.190
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1 Kegiatan	33.401.757.439
				Kegiatan: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan:	2 Sub kegiatan	33.401.757.439
				1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		33.399.632.438
				2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		2.125.001
Sasaran Kabupaten : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis Kreativitas dan Inovasi						
	Meningkatnya Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU)	1. Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100,00%	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1 Kegiatan	60.740.985.436
				Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan:	4 Sub Kegiatan	60.740.985.436

				1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	638.132.632
				2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	59.233.764.334
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	858.769.091
				4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	10.319.379
						117.137.641.642
		No	Program	Jumlah	Anggaran (Rp)	Ket (Sumber dana)
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		15.649.601.000	APBD
		2	Program Kawasan Permukiman		6.888.339.484	APBD
		3	Program Pengembangan Perumahan		456.958.283	APBD
		4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		33.401.757.439	APBD
		5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		60.740.958.436	APBD
			Total Belanja Langsung		117.137.641.642	

BUPATI BADUNG

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos


 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
A.A. Ngurah Bayu Kumara Putra, ST., MT
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19670425 199803 1 006